

## DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

**TAHUN 2024**

### A. BERSIFAT UMUM

No.	Sumber Informasi	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
				Akibat Info dibuka	Akibat Info ditutup	
1.	Semua Unit Kerja	Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya sangat rahasia,terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangandan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas

	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009</li> </ul>	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
	Informasi hasil rapat pemerintahan (Laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup) yang belum didokumentasikan)	UU No.14 Tahun 2008 UU No.43 Tahun 2009	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijaka	Melindungi kerahasiaadokumen	Tidak Terbatas
	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</li> <li>• UU No.43 Tahun 2009</li> </ul>	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku
	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008</li> </ul>			

			<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Selama masih digunakan
		Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan Oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Tidak Terbatas
		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Tidak Terbatas

	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Tidak Terbatas
	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a</li> </ul>	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan	Tidak Terbatas
	Opini Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 Pasal 28D</li> </ul>	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum	Tidak Terbatas
	Proses Hukum Pegawai ASN yang bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan h</li> </ul>	Menghambat proses Penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

	Internet Protocol/IP AddressPrivate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30</li> </ul>	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hakakses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)	Tidak Terbatas
	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Selama sistem digunakan
	Spesifikasi sarana komunikasisandi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal17 huruf c</li> <li>• UU No 11 Tahun 2008</li> </ul>	Rentan Penyalahgunaan oleh pihaklain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Selama sistem digunakan

		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Tidak Terbatas
		Data Elektronik PNS Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yangbersifat rahasia	Tidak Terbatas
		Dokumen/Berkas/Arsip PNS masing-masing SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yangbersifat rahasia	Tidak Terbatas

	Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan / perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Tahun 1945 pasal 28 G</li> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan I</li> <li>• PP No. 100 Tahun 2000</li> </ul>	Mengganggu, menghambat, dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum	Sampai pelantikan
	Data rencana penempatan PNS/CPNS	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif	Sampai dengan penyerahan SK Gubernur kepada PNS/CPNS
	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 11 Tahun 2008 pasal 17 huruf c</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Selama Sistem digunakan
	Data User Name dan Password Aplikasi penguasaan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf f</li> </ul>	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan serta privasi	Melindungi kerahasiaan dokumen dan keamanan sistem	Tidak Terbatas

		Laporan Kekayaan gaji dan kondisi keuangan asset dan rekening bank atas nama pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>	Penyalahgunaan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan LHKPN
		Laporan Pajak Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Penyalahgunaan data	Melindungi Kerahasiaan dokumen	30 tahun sejak dilaporkan

B. BERSIFAT KHUSUS

No.	Sumber Informasi	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
				Akibat Info dibuka	Akibat Info ditutup	
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara	Kode Akses Elektronik, Sidik Jari, Web pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Tidak Terbatas
		Sistem Persandian (perangkat, Sarana peralatan, tempat kegiatan sandi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Selama sistem digunakan
		Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> <li>• UU No.11 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)	Tidak Terbatas

			Informasi dan Transaksi Elektronik			
		Perangkat Khusus Persandian	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Selama sistem digunakan
		Penempatan jaringan, peralatan sandi, dan tempat kegiatan sandi	• UU No 11 tahun 2008 huruf c	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan Keamanan	Keamanan sistem	Selama sistem digunakan
		Sistem keamanan website / aplikasi yang menjadi tanggungjawab Kominfo	• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17J	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan system	Selama sistem digunakan
3.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Sultra	Rincian Hasil Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
		Naskah ujian tertulis bagi bakal calon Pimpinan BUMD	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya
		Kunci Sistem Sandi Biro	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Dapat membahayakan pertahanan dan	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan

			huruf c angka 6	keamanan negara		keamanan negara
		Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip –prinsip dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
		Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai denganyang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses pengadaan barang/jasa
		Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan	Selama masih berlaku
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Informasi Status Kepemilikan Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan Dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila disalah gunakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan Menghindari ada permasalahan hukum di kemudian hari	Sampai ada konfirmasi resmi dari BPKAD Prov.Sultra atas surat permohonan
		Sertifikat Tanah Penguasaan Pemprov. Sultra	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengadilan keputusan /kebijakan	Tak terbatas

	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih belum proses/belum diaudit/belum dituangkan dalam perda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I</li> </ul>	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat proses audited	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan data selamat proses audited	Sampai dengan LKPD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah
	Data Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengadilan keputusan/ kebijakan	Sampai ditetapkannya Daftar Barang Milik Daerah di Audited
	Semua data – data dan dokumen Pemindah tanganan dengan cara Hibah dan Tukar Menukar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan/ dokumen disalahgunakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
	Draft Ringkasan RKA-SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i</li> </ul>	Mengganggu/ menghambat proses penyusunan keputusan/ kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Setelah disahkan
	Draft Ringkasan RKA-PPKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i</li> </ul>	Mengganggu/ menghambat Proses penyusunan keputusan/ kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Setelah disahkan